

Paradigma Pendidikan Kritis Dalam Dimensi Kesadaran Kritis Dan Proses Dialogis Kritis

Anak Agung Gde Putera Semadi
Universitas Dwijendra
puterasemadi60@gmail.com

Abstrak

Pendidikan kritis merupakan sebuah pemikiran alternatif, setelah kejenuhan menghadapi dunia baru yang terlalu didominasi oleh pemikiran positivistik yang menghasilkan pola sosialitas materialistis dan kapitalistik. Melalui proses identifikasi kritis, manusia pada umumnya dan siswa pada khususnya mampu mengembangkan berbagai potensi atau kreativitas, rasa, karsa, dan kreasi yang menjadi inti dari proses budaya. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan prosedur yang menggunakan pendekatan fenomenologis. Semua data dapat dideskripsikan secara jelas melalui penerapan metode analisis deskriptif tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendidikan kritis bukan hanya sekedar transfer pengetahuan atau informasi, tetapi merupakan proses psikologis atau praktik budaya menuju kesadaran diri atau pembebasan siswa. Fungsi utama pengembangan pendidikan kritis adalah upaya penyadaran diri, atau disebut juga kesadaran kritis, sebagaimana waktu mengembangkan metode pembelajaran utamanya dengan menekankan prinsip dominasi dialogis kritis.

Kata kunci: Pendidikan kritis, Dimensi pendidikan kritis, Proses dialogis kritis.

Abstract

Critical education is an alternative thinking, after being bored with a new world that is too dominated by positivistic thinking that produces a materialistic and capitalistic pattern of sociality. Through a critical identification process, humans in general and students in particular are able to develop various potentials or creativity, taste, initiative, and creation which are the core of the cultural process. This research was classified as a qualitative research with a procedure that uses a phenomenological approach. All data can be described clearly through the application of descriptive analysis methods without using statistical procedures or by other means of quantification. Critical education is not just a transfer of knowledge or information, but is a psychological process or cultural practice towards self-awareness or student liberation. The main function of developing critical education is self-awareness, or also called critical awareness, as when developing its main learning method by emphasizing the principle of critical dialogical dominance.

Key words: Critical education, Dimensions of critical education, Critical dialogical process.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan kritis lahir dalam dekade 20-an dan mulai berkembang pesat sekitar dekade 70-an. Pada mulanya pendidikan kritis merupakan pemikiran pendidikan progresif dari georde S. Counts. Menurut Counts ada tiga masalah vital yang menyebabkan lahirnya pendidikan kritis (*critical pedagogy*). Ketiga masalah tersebut adalah: (1) mengkritik masalah pendidikan konservatif, (2) memberikan ruang terhadap peranan guru untuk menjadikan pendidikan sebagai agen dari perubahan sosial, dan (3) masalah penataan ekonomi sebagai salah satu syarat untuk perbaikan pendidikan (Setiarsih, 2017).

Pendidikan kritis bukanlah pendidikan yang mengambil jarak dengan masyarakat, tetapi yang menyatu dengan masyarakat dan memihak pada rakyat yang tertindas. Sejak era revolusi kemerdekaan konsep dan implementasi pendidikan kritis di Indonesia sudah mulai berkembang Hal ini dapat dibuktikan melalui mutiara-mutiara

pemikiran dan prilaku kebangsaan beberapa tokoh pahlawan nasional seperti R.A. Kartini, Dr Sutomo, dan K.H. Dewantara. Perjuangan tokoh-tokoh nasionalisme ini banyak menuai badai baik dalam ruang ideologis maupun pragmatis. Perbedaan paradigma para pemikir pendidikan waktu itu bernuansa aneka kepentingan seperti sosial, adat-istiadat, sikap feodalisme internal dan eksternal. Demikian pula kepentingan politik nasionalisme RI yang sering mendapat tekanan dari bangsa penjajah. Kenyataan itu bergulir dalam kurun waktu yang relatif panjang guna mendapatkan solusi terbaik dan tepat untuk tumbuh dan berkembangnya falsafah multikulturalisme serta karakter anak bangsa agar hasilnya dapat diwariskan bahkan diteladani oleh semua generasi penerus, pengemban, dan pengisi kemerdekaan ini. Pergolakan tarik-ulur kepentingan antara idealisme (berbasis pada nilai-nilai akademik) dengan pragmatisme (berbasis pada

nilai koporasi) dalam dunia pendidikan tersebut menimbulkan banyak pengorbanan baik fisik maupun mental spiritual, dan tidak ketinggalan pula pengorbanan yang berupa material.

Berbicara masalah idealisme dan pragmatisme pendidikan, Nuryanto dalam (Arief, 2016) menyatakan bahwa di antara keduanya (idealisme dan pragmatisme pendidikan) terdapat tiga kemungkinan adanya relasi, yakni: **pertama**, menjadikan nilai-nilai akademik sebagai basis institusi pendidikan; **kedua**, menjadikan nilai-nilai koporasi sebagai basis institusi pendidikan; dan **ketiga**, menjadikan nilai-nilai akademik dan koporasi bersamna-sama sebagai basis institusi pendidikan karena kedua nilai ini dipastikan setara, tidak satu di atas yang lain. Memasukkan nilai-nilai tersebut dalam institusi pendidikan memiliki implikasi yang sangat signifikan. Dengan demikian, maka perlu pemikiran dan pertimbangan yang matang untuk meletakkan nilai apa

yang paling relevan dijadikan sebagai basis institusi pendidikan itu.

Permasalahannya sekarang adalah apakah pendidikan akan lebih memengaruhi realitas sosial, atau sebaliknya realitas sosial yang akan lebih banyak memengaruhi pendidikan? Di satu sisi Neil Postman (1955), menyebutkan pendidikan mempunyai peran yang luar biasa dalam membentuk kehidupan publik, bahkan peran itu tidak sekedar memberi afirmasi atas peran pendidikan dan kehidupan publik, tetapi justru pertanyaan: “kehidupan publik seperti apa yang hendak dibentuk oleh dunia pendidikan?” Pertanyaan ini didasarkan pada satu keyakinan bahwa pendidikan itu betul-betul memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural (Arief, 2016). Inilah satu asumsi yang notabene melatarbelakangi pentingnya mengembangkan pendidikan kritis yang berdimensi kesadaran kritis dan dialogis kritis kepada para peserta didik di seluruh

wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali.

II. METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis. Objek kajiannya pada teks serta konteksnya yang ada di masyarakat. Penelitian kualitatif termasuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata serta data berupa gambar yang dapat diamati dan dideskripsikan dengan jelas tanpa menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis. Semua data lapangan serta data dari hasil studi pustaka yang telah diklasifikasi dikaji sedemikian rupa dengan menggunakan teori Pendidikan Kritis dari Paulo Freire. Untuk memperoleh hasil telaah yang kritis, logis, dan sistematis dalam penelitian ini, maka jelas aplikasi metode

analisis deskriptif dalam tidak bisa dihindari. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive random sampling* dan dikembangkan dengan teknik *snowball*. Sumber data diperkuat juga dengan instrumen penelitian berupa pedoman observasi partisipasi, pedoman wawancara mendalam, rekaman, serta studi dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma pendidikan kritis yaitu cara pandang pendidikan yang menganut bahwa pendidikan adalah diorientasikan pada refleksi kritis terhadap sistem dan struktur sosial yang menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan. Tokoh-tokoh pedagogi kritis di antaranya adalah Paulo Freire, John Dewey, Ivan Illich, Mazhab Frankfurt (Theodore Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer), Henry Giroux, Michael W. Apple, Ira Shor, Stanley Aronowitz, Peter McLaren, Mashour Fakhri, dan lain-lain. Pendidikan bermaksud untuk memberikan

peluang dan kesempatan kepada peserta didik agar mampu mengakses sumber pengetahuan berdasarkan tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik (Santika, 2022). Selain itu pendidikan juga harus mencapai tiga fondasi utama yang ada dalam pendidikan agar memberikan ruang interaksi dinamis bagi siswa dalam praktik di sekolah, yaitu (1) pendidikan harus membebaskan, (2) pendidikan harus memberikan akses yang sama kepada setiap peserta didik, dan (3) pendidikan harus memberikan ruang bagi terbentuknya interaksi yang seimbang antar setiap peserta didik. Pendidikan harus mampu melampaui transfer pengetahuan dan pelatihan angkatan kerja masa depan; untuk membantu kesadaran kritis, yang mengarah pada transformasi individu, lingkungan belajar, dan masyarakat pada umumnya (Abraham, 2016). Pendidikan kritis (*critical pedagogy*) tidak hanya ingin menciptakan pendidikan yang membebaskan siswa dalam berpikir kritis saja, tetapi lebih dari itu pada

transformasi di masyarakat.

2.1 Dimensi Kesadaran Kritis

Kesadaran kritis berarti pemahaman dan analisis hubungan kausal di mana manusia menemukan diri mereka berada dalam suatu situasi (Santika, 2022). Paulo Freire menyatakan bahwa kesadaran kritis adalah puncak kesadaran manusia. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa kesadaran kritis menurut Paulo Freire ini hanya menjadikan realitas sosial dan sistem sebagai objek kajian dan permasalahan kesadaran ini hanya terbatas pada realitas dunia. Freire menambahkan bahwa kesadaran manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis.

Orientasi pendidikan yang didasarkan pada ideologi idealisme tidak sekadar penguasaan pengetahuan instrumental, tetapi juga pengetahuan emansipatoris ala Habermasian. Menurut Arief, penekanan utama dalam proses pedagogis adalah bagaimana

memahami, mengkritik, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami dan mengubah realitas hidup. Proses pedagogis dan edukatif lebih diarahkan untuk mengembangkan kesadaran kritis peserta didik daripada sekadar untuk menguasai keterampilan-keterampilan teknis. Kesadaran kritis (*critical consciousness*) adalah *mode of thought* yang mampu mendeteksi fenomena-fenomena tersembunyi atau melampaui asumsi-asumsi yang hanya berdasarkan *commonsense*. Kesadaran kritis pada dasarnya adalah kemampuan berpikir kritis yang di dalamnya terkandung dimensi politik dan kultural.

Kesadaran kritis memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan istilah “upaya penyadaran diri”. Seorang tokoh terkemuka pendidikan kritis, Freire (1968), menyebutkan istilah ini dengan *conscientizacao*, sebagai fungsi serta sasaran utama dalam mengembangkan pendidikan kritis

(Semadi, 2018). Inti dari konsep kesadaran kritis itu adalah proses dialektis-dialogis yang mengantarkan individu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah substansial dan eksistensi yang melekat pada kesadaran masyarakat. Muara dari proses ini adalah terwujudnya pembebasan diri, dalam arti transformasi sistem/struktur dan realitas normatif (penciptaan norma, aturan, prosedur) yang membelenggu atau mengunci ketidakberdayaan individu serta reformasi perilaku yang tidak sesuai dengan sistem dan realitas yang baru.

Kesadaran kritis merupakan salah satu dari tiga jenis tipe kesadaran yang ada selain kesadaran magis, dan kesadaran naif. Khusus tentang kesadaran kritis, jenis kesadaran ini dapat dijelaskan sebagai tipe kesadaran yang melihat atau mencari akar kondisi yang dihadapi kelas bawah (kelompok terdominasi) itu pada struktur sosial, politik, ekonomi, serta budaya yang melatari mereka. Kondisi ini sering

tidak disadari oleh kelompok marginal tersebut karena dikemas sebagai sesuatu yang alamiah (rasional), dan mereka dianggap ikut menopangnya.

Kesadaran kritis adalah salah satu pemikiran seseorang bahwa suatu kejadian merupakan faktor penyebab yang berasal dari luar diri manusia. Contoh kesadaran kritis: sebageian masyarakat kecil tidak dapat melanjutkan pendidikan (melanjutkan sekolah) ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Freire pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transitatif. Memang tidak bermaksud seseorang langsung mencapai tingkat kesadaran tertinggi itu, tetapi belajar adalah prosesbergerak dari kesadaran nara didik pada masa kini ke tingkatan kesadaran yang di atasnya atau yang lebih tinggi.

2.2 Proses Dialogis-Kritis

Paulo Freire adalah salah seorang tokoh pendidikan yang ikut berperan andil dalam teori pendidikan. Freire memiliki corak

pemikiran pendidikan sebagai praktik kebebasan yang fokus perhatiannya pada kesadaran kritis. Konsep yang diberikan Freire yaitu melalui pendidikan dialogis yang implikasinya adanya daya kritis serta interaksi yang aktif antara tenaga pendidik dan peserta didik. Dalam konteks ini, individu harus secara sadar mengutarakan pemikirannya (Santika, 2022). Namun masalah yang dihadapi ketika dilaksanakan pembelajaran jarak jauh misalnya, justru yang terjadi adalah kurangnya dialog interaktif antara mahasiswa dengan dosen karena tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kurangnya dialog maupun terbatasnya ruang untuk menyampaikan pemikirannya satu sama lain tentu ilmu yang sudah diserap itu tidak bisa berkembang karena tidak adanya diskusi atau dialog yang kritis.

Pendidikan kritis memiliki peran sangat strategis dan krusial dalam mendukung bahkan mempercepat pembentukan masyarakat demokratis berkeadaban,

yang menjadi salah satu karakter terpenting masyarakat madani Indonesia. Selain itu, pendidikan kritis juga berperan mempersiapkan anak bangsa, baik secara individual maupun sosial agar memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perkembangan masyarakat madani. Seorang pemikir sekaligus penulis besar Rusia, Lev N. Tolstoy (1828-1910) pernah menyatakan bahwa: “Pendidikan mampu mengubah dunia, menciptakan kebudayaan, mengukir sejarah, merekayasa dunia menjadi lebih adil dan manusiawi. Pendidikan memiliki segala hal untuk melakukan perubahan: konsep, gagasan, sistematika, kekuatan...”

Dalam berbicara masalah pendidikan biasanya cenderung berpikir pada dua dimensi, yakni: (1) dimensi praktis pedagogik, dan (2) dimensi normatif. Dimensi pertama, adalah dimensi teknis yang menyangkut berbagai strategis, proses, serta tindakan untuk mengembangkan serta

memfungsikan pendidikan dalam masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Dimensi kedua, meliputi kebijakan yang berusaha merumuskan nilai-nilai kependidikan sebagai landasan mewujudkan cita-cita bersama baik dalam skala mikro (keluarga/masyarakat) maupun skala makro (kehidupan berbangsa).

Selain kedua dimensi di atas, tentunya masih ada lagi satu dimensi strategis yang lazim diperhitungkan (walau sering diabaikan) dalam setiap berbicara masalah realitas problematik pendidikan. Dimensi tersebut adalah dimensi ideologis kultural. Dimensi ini kurang lebih meliputi aspek praktik relasi kekuasaan, bias persepsi kultural laten, ekspansi dominasi ideologi global (globalisasi), ilusi sebagai dampak upaya pencitraan (imagologi) dalam pendidikan, dan bahkan ilusi pencapaian kualifikasi pendidikan yang bersifat absurd. Dore (1976) mengistilahkan hal ini sebagai *diploma disease*.

Pada hakikatnya melihat proses pendidikan berdimensi ideologis kultural berarti menempatkan posisi pendidikan itu sebagai bagian dari jaringan praktik sosial budaya yang kompleks dari satu masyarakat. Pendidikan tidak hanya harus dibatasi pada praktik-praktik pembelajaran di lembaga sekolah (*schooling*), melainkan juga menyangkut berbagai kehidupan yang secara umum sering disebut sebagai proses ke kebudayaan. ***“Education can never be divorced from its social setting, since the actors in education are social actors who carry with them the symbols and orientations marking them as belonging to distinct sectors of society”*** (Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sosial, karena para pelaku dalam pendidikan itu adalah aktor sosial yang membawa serta simbol dan orientasi yang menandai mereka sebagai bagian dari sektor masyarakat yang berbeda).

Melalui proses pendidikan secara umum dan pendidikan kritis

pada khususnya, manusia terlebih peserta didik dapat mengembangkan berbagai potensi atau daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang menjadi inti proses budaya. Dalam hal ini, tidak mengherankan apabila budaya dalam konsep esensial pendidikan dirumuskan oleh John Singleton sebagai *“the shared product of human learning”*. Memerhatikan beberapa batasan di atas, maka tidak berlebihan apabila dalam upaya mengembangkan pendidikan kritis ketiga dimensi di atas hendaknya mendapat ruang wacana yang seimbang, di samping proses pendidikan dirumuskan sebagai proses berdimensi ideologis kultural, atau dapat diistilahkan sebagai proses humanisasi (pemanusiaan manusia). Proses pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dalam rangka penciptaan budaya sekaligus pewarisannya (*cultural creation and cultural transmission*) kepada generasi muda. Oleh karena itu, paradigma pendidikan kritis perlu dikembangkan

dengan berpijak pada landasan ideologis kultural yang kokoh. Keprihatinan kalangan ahli pendidikan dan ilmuwan-ilmuwan sosial terhadap realitas ketidakmerataan kesempatan mendapatkan pendidikan (*inequality in education*) terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah telah melatarbelakangi lahirnya satu model pendidikan yang sangat berarti dalam mengadakan reformasi dan demokratisasi pendidikan yang berkualitas di masa depan. Model pendidikan ini lebih populer disebut pendekatan pendidikan kritis. Paradigma model pendidikan kritis ini diyakini mampu membantu kaum marginal dalam masyarakat untuk menyadari realitas sosial yang dihadapi sekaligus menjadi awal bagi upaya mengubah sistem serta struktur yang membelenggu mereka. Intinya model pendidikan ini akan mendorong kelompok bawah untuk membebaskan dirinya sendiri melalui proses penyadaran diri sebagai esensi tujuan proses pendidikan yang dijalankannya. Model

pendidikan kritis adalah proses penyadaran diri yang sangat terkait dengan kesadaran kritis.

Metode utama pendidikan kritis dalam pembelajarannya sangat didominasi oleh prinsip “dialogis-kritis”. Ciri-cirinya sebagai berikut:

"Pendekatan pembelajaran dialogis-kritis (dialog bebas) berbeda dengan komunikasi monologis terarah pada proses pendidikan tradisional yang biasanya berujung pada sasaran tersembunyi berupa domestifikasi sikap anak terhadap lingkungannya. Komunikasi dialogis kritis bertujuan mengembanngkan sikap/kesadaran kritis sebagai agen pembebasan diri subjek didik. Proses ini diistilahkan Freire sebagai aktivitas *cointensional*, yaitu gerak bersama antara guru-murid untuk mencapai tujuan bersama. Dari segi belajarnya, inti proses dialogis kritis ini berupa gabungan antara gerak “refleksi” dan “aksi”. Refleksi merupakan perenungan (balik) untuk mencapai kesadaran mendalam sebagai inti makna proses belajar. Sedangkan aksi dimaksudkan sebagai tindakan nyata (proses praksis) dalam rangka penyadaran diri tersebut. Refleksi dan aksi harus dikembangkan secara bersamaan. Oleh karena refleksi tanpa aksi hanya menghasilkan wacana (*verbalisme*). Selanjutnya, tindakan (aksi) tanpa refleksi hanya bermakna *aktivisme* (aktivitas tanpa didukung kesadaran mendalam). Suasana dialogis dari komunikasi guru-murid

hanya mungkin dikembangkan melalui semangat “cinta sesama” (jadi bersifat *non- hierarchis*)”.

Dari suasana belajar di atas lebih lanjut dapat dikatakan bahwa peran peserta didik sangat didorong oleh keinginan untuk menjadikan dirinya *co-investigator* bersama guru dalam berbagai aktivitas serta kegiatan ilmiah di sekolah. Inti materi belajarnya berupa realitas konkret yang ada di sekitar siswa, yaitu realitas eksistensial siswa sebagai satu proses kodifikasi keseluruhan keberadaan hidupnya. Topik-topik keadaan ini kemudian dikodifikasi (dibedah) untuk akhirnya mencapai tingkat pengetahuan kritis (pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya). Praktik pembelajaran seperti ini dapat disejajarkan dengan CTL (*Contextual Teaching and Learning* : Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual). Atau dengan kata lain, sering juga dikenal dengan istilah PPE (*Problem Posing Education* : Pendidikan dengan pola hadap masalah), yakni: pola pendidikan yang secara mendasar bertujuan untuk mentransformasikan sistem serta struktur sosial yang memarginalkan diri peserta didik dengan memampukan individunya

untuk mengembangkan kekuatan diri (*self-empowerment*), serta meningkatkan kemampuan memahami sekaligus mengungkapkan eksistensi realitas dirinya (*unveiling the reality*). Berikut adalah beberapa prasyarat utama dalam mengembangkan pendidikan kritis yang dilandasi dengan pendekatan PPE ;

1. Mendorong siswa memosisikan dirinya sebagai agen proses demitologisasi atau dekodifikasi (dekonstruksi) realitas yang dihadapinya. (permasalahan riil yang ada di lingkungannya).
2. Memandang dialog sebagai hal yang esensial dalam proses belajar melalui tindakan kognisi yang memberi peluang bagi proses *constant unveiling of reality*: pengungkapan realitas diri secara berkelanjutan.
3. Pengakuan historisitas umat manusia sebagai titik pangkal, yaitu bahwa manusia bisa mengubah nasibnya dalam sejarah hidupnya melalui kesadaran kritis (Semadi, 2018).

Arah pengembangan pendidikan kritis yang berkualitas memerlukan landasan budaya yang

kuat. Peristiwa pendidikan merupakan bagian dari budaya suatu komunitas bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah pengembangan pendidikan kritis tidak bebas dari kebudayaannya, atau harus memerhatikan faktor-faktor sosial budaya masyarakat. Untuk memadukan sistem budaya di dalam masyarakat atau bangsa yang berkaitan dengan upaya mengembangkan pendidikan kritis, maka pendapat K.H. Dewantara (1977) dalam Uno dan Lamatenggo (2016:131) tentang Asas Trikonnya menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Asas Trikon K.H. Dewantara meliputi: (1) Kontinuitas, (2) Konvergensi, dan (3) Konsentris. Dengan demikian, pendidikan yang penting bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan yang berciri khas Indonesia, yakni: pendidikan yang menitikberatkan pada kepentingan bangsa. Artinya: pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik dalam menghadapi masa depan tanpa meninggalkan aspek-aspek

kecerdasan berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh.

Menurut Adnan, pendidikan yang diperlukan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang dapat: *Pertama*, memperkukuh jati diri kesadaran bangsa; *Kedua*, seyogyanya bukan hanya menekankan diri pada segi intelektualitas dan materialitas, tetapi juga menumbuhkan potensi rohaniah; *Ketiga*, tetap memiliki visi untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa yang menjunjung tinggi nilai etika, moral dan kemanusiaan.

Jadi, dilihat dari sudut pandang di atas, maka salah satu alternatif yang tidak dapat diabaikan dalam mengantisipasi masa depan pendidikan bangsa adalah menyiapkan diri, khususnya bagi generasi muda melalui strategi

pendidikan (pembinaan) yang mendorong munculnya kesadaran kritis atas kondisi/realitas lingkungannya. Melalui pendidikan yang demikian, paling tidak mereka dapat menjadi lebih awas menghadapi berbagai jebakan ideologis dari kepentingan eksternal yang merugikan perkembangan kehidupan ke depan. Di sinilah letak garis besar paradigma pengembangan pendidikan kritis (*Educational for Critical Consciousness*) dalam dimensi kesadaran kritis dan proses dialogis kritis itu.

IV. SIMPULAN

Paradigma pendidikan kritis pada hakikatnya lebih diarahkan pada perwujudan kesadaran kritis dan implementasi metode pembelajaran yang didominasi oleh prinsip dialogis-kritis. Dalam hal ini peran peserta didik sangat didorong oleh keinginan untuk menjadikan dirinya *co-investigator* bersama guru dalam berbagai aktivitas serta kegiatan ilmiah di sekolah. Inti materi belajarnya berupa realitas

konkret yang ada di sekitar siswa, yaitu realitas eksistensial siswa sebagai satu proses kodifikasi keseluruhan keberadaan hidupnya.

Education for Critical Consciousness (pendidikan kritis) pada prinsipnya menyiapkan diri dan mendorong bangkitnya kesadaran kritis generasi muda peserta didik dari kondisi dan realitas lingkungannya. Hal ini merupakan satu langkah strategis yang dapat menumbuhkan sikap lebih awas dalam menghadapi berbagai jebakan ideologis dari kepentingan eksternal yang merugikan perkembangan kehidupan ke depan. Untuk dapat mewujudkan hasil pengembangan pendidikan kritis yang berkualitas, maka cenderung ketiga dimensi pendidikan (praxis pedagogik, normatif, dan ideologis kultural) itu diberikan ruang yang sederajat baik dalam batas wacana maupun penerapannya.

Pendidikan hendaknya dapat dirumuskan dengan matang sebagai proses berdimensi kultural. Mengembangkan pendidikan kritis

yang berkualitas di atas landasan kebudayaan merupakan kunci pokok (cipok) penyadaran diri setiap anak bangsa/generasi muda bangsa yang tangguh. Esensi pendidikan kritis adalah upaya membebaskan manusia dari penindasan struktural melalui proses pedagogi yang berintikan penyadaran diri yang kritis (kesadaran kritis). Secara lebih luas tentu hal ini menyangkut refleksi dan aksi kultural menuju pembebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mukhrizal .(2016). *Pendidikan Posmodernisme Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*. Yogyakarta: AR. RUZZ MEDIA.
- Darmaningty, 2015. *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Intrans Publishing.
- Freire, Paulo. 2017. *Politik Pendidikan Keudayaan Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Read (Research, Education and Dialogue) bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Pratama, P. A. M. W., & Swarniti, N. W. (2021). THE APPLICATION OF LITERACY CULTURE IN GROWING READING INTEREST IN SMP NEGERI HINDU 3 BLAHBATUH GIANYAR: A CASE STUDY. *Widyasrama*, 32(2), 87-91.
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. Global Aksara Pers.
- Santika, I. G. N., Suastra, I. W., & Arnyana, I. B. P. (2022). Membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar melalui pembelajaran ipa. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 207-212.
- Semadi, Anak Agung Gde Putera. (2018). *Pendidikan Kritis Berdimensi Ideologis Kultural*. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya.
- Seri Buku Saku Tempo, 2017. *Gelap TerangHidup Kartini*.. Jakarta: KPG(Kepustakaan Popular Gramedia) bekerjasama dengan Tempo Publishing.
- Setiarsih, Ari. (2017). *Diskursus Pendidikan Kritis (Critical Pedagogy) Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*.

- Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaran*. 5 (2).
- Subkhan, Edi. 2016. *Pendidikan Kritis. Kritik Atas Praksis Neo-Liberalisasi dan Standardisasi Pendidikan*. Yogyakarta: AR. RUZZ MEDIA.
- Toha Sarumpaet, Riris. ed. 2016. *Krisis Budaya, Oasis Guru Besar Fakultas Ilmuj Pengetahuan Budaya UI*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Uno, Hamzah B. 2016. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Swarniti, N. W. (2021, August). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Quizizz Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa. In Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran (Vol. 1, No. 1, pp. 133-144).
- Wahyuni, N. P. S., Widiastuti, N. L. G. K., & Santika, I. G. N. (2022). Implementasi Metode Examples Non Examples Dalam Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(1), 50-61.
- Wijaya, David. 2017. *Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zubaedi, 2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.